



PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI PEMILU 2024

Ali Azhar^{1*}, Mulono Apriyanto², KMS Novyar Satriawan Fikri¹, Hermiza Mardesci²,
Marlina³, Rifni Novitasari², Yulianti²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

²Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Indragiri

³Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Indragiri

Article Information

Article history:

Received Desember 29,
2023

Approved January 04,
2024

Keywords:

Democracy,
Political
Education,
Election,
President, Parliament

ABSTRACT

In 2024, Indonesia will hold general election, which is a routine agenda of every five years. But the 2024 election has an important signification as it would determine Indonesia's future. Apart from electing new members of parliament and a new president, after President Joko Widodo was unable to run for office due to the provisions of the 1945 Constitution, the 2024 election will be a touchstone for assessing the quality of democracy in Indonesia. At the end of Susilo Bambang Yudhoyono's administration, Indonesia's democracy was said to have stagnated, because President Susilo Bambang Yudhoyono's policies were more accommodative to various parties within the parliament in order to maintain political stability and economic growth. With such kind of policy, reform of the bureaucracy and the military must have proceeded slowly, and eradicating corruption is still a big homework, and the protection of minorities and freedom of the press had to be fought for. But under the Jokowi's administration, Indonesia's democracy is said to have suffered a setback due to political polarization, revision of the Corruption Eradication Commission (KPK) law, rampant corruption, and restrictions on civil liberties. To overcome this situation, it is important to provide political education to the public so that they are able to choose qualified leaders, such as through conducting lectures and discussions. The paper is a report of discussion held at Sungai Rukam village, Enok Subdistrict, Indragiri Hilir District. It showed that that participants have a good understanding of political developments, especially those related to

election, but they are still vulnerable to hoax and hate speeches, and in consequence, being trapped in political polarization.

ABSTRAK

Pada tahun 2024, bangsa Indonesia akan menjalankan pemilihan umum, yang merupakan sebuah agenda rutin setiap lima tahun. Tetapi Pemilu 2024 memiliki arti penting karena akan menentukan masa depan Indonesia. Di samping memilih anggota parlemen yang baru dan presiden baru, setelah Presiden Joko Widodo tidak bisa mencalonkan diri akibat ketentuan UUD 1945, Pemilu 2024 akan menjadi batu ujian menyangkut kualitas demokrasi di Indonesia. Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, demokrasi Indonesia disebut mengalami stagnasi, karena Presiden SBY melakukan kebijakan politik yang lebih akomodatif terhadap berbagai pihak demi menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, reformasi birokrasi dan militer harus berjalan secara pelan-pelan, pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, dan perlindungan kaum minoritas serta kebebasan pers masih harus diperjuangkan. Tetapi di era Jokowi, demokrasi Indonesia disebut mengalami kemunduran akibat polarisasi politik, perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih merajalelanya korupsi, serta pembatasan kebebasan sipil. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka penting untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga mereka mampu memilih para pemimpin yang baik di Pemilu 2024. Salah kegiatan yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan ceramah dan diskusi di sebuah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni di Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang baik mengenai perkembangan politik terutama yang terkait dengan pemilu. Mereka juga antusias mengikuti ceramah dan diskusi. Hanya saja, mereka masih rentan kurang kritis ketika menerima berita yang datang kepada mereka, sehingga rentan terjebak dalam polarisasi politik.

© 2024 EJOIN

**Corresponding author email: mulonoapriyanto71@gmail.com*

PENDAHULUAN

Indonesia akan menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Meski pemilu merupakan agenda demokrasi yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun, namun Pemilu 2024 memiliki makna tersendiri. Pada kesempatan tersebut, rakyat Indonesia akan memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat (DPR) dan

di tingkat daerah (DPRD I dan DPRD II) serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tanggal yang ditetapkan adalah 14 Februari 2024, dan akan diadakan pemilu presiden putaran kedua jika belum muncul calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Beberapa bulan kemudian, yakni bulan November 2024, pemilihan umum kembali diselenggarakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Dengan banyaknya agenda yang diselenggarakan pada saat bersamaan tersebut, tentu bisa dibayangkan kerepotan yang akan dialami oleh para petugas penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama jika memperhatikan pengalaman penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019. Saat itu ada banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal karena berbagai alasan seperti kelelahan dan serangan jantung akibat kegiatan pemilu yang padat dan penuh beban. Pemilu serentak tahun 2019 dimaksudkan untuk memilih calon anggota DPR/DPRD I dan II serta DPD bersamaan dengan pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Sistem proporsional terbuka masih dipakai pada Pemilu 2019, untuk memilih anggota DPR dan DPRD I dan DPRD II. Sistem ini semakin membuat rumit pemilihan, karena terdapat banyak partai politik dan calon anggota legislatif yang bersaing. Setidaknya ada 16 partai nasional dan 4 partai lokal di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain masalah korban akibat pemilu serentak dengan sistem pemilu proporsional terbuka di atas, persoalan lain yang muncul adalah masalah biaya pemilu yang tinggi, baik yang dikeluarkan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum maupun para peserta pemilu baik partai politik maupun para calon anggota legislatif. Pemilu 2019 menelan biaya sebanyak 24,8 trilyun, lebih besar dari pemilu dan pilpres 2014 sebanyak 24,1 trilyun (Arif, 2019: 161). Bahkan, akibat biaya pemilu yang tinggi tersebut bisa memicu korupsi politik di kalangan anggota parlemen terpilih demi memulihkan modal yang telah dikeluarkan (Abdussamad, 2023: 15).

Arti penting pemilu 2024 juga bisa dilihat dari segi kualitas demokrasi, apakah momen ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pada saat ini banyak pengamat menyatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia (juga di negara-negara lain di seluruh dunia) sedang mengalami kemunduran. Banyak indikasi yang dipandang mendukung pandangan tersebut. Misalnya, tingkat korupsi yang masih tinggi, yang melibatkan para pejabat kementerian, anggota legislatif, bahkan para hakim agung. Padahal hilangnya korupsi merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Indikator lain dari kemunduran demokrasi adalah pembatasan kebebasan sipil dan partisipasi politik. Pemerintahan Presiden Jokowi telah memanfaatkan undang-undang ITE untuk menangkap para lawan politik yang menggunakan media sosial sebagai sarana mengungkapkan aspirasi dan mengkritik kebijakan Jokowi. Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan undang-undang ormas tahun 2021 yang mewajibkan semua organisasi sosial memiliki pandangan dan ideologi yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, yang tentu saja mengikuti tafsiran pemerintah. Dalam keseimbangan kekuasaan, pemerintahan Jokowi juga telah memonopoli suara di parlemen, dengan hanya menyisakan dua partai yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di luar pemerintahan, sehingga mengakibatkan pemerintah bisa membuat kebijakan tanpa banyak mengalami kritikan dan penentangan (Mujani, 2021).

Kemunduran demokrasi di Indonesia oleh banyak pengamat sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo. Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono para pengamat menyebut demokrasi Indonesia mengalami stagnasi, karena Presiden SBY melakukan kebijakan politik yang lebih akomodatif terhadap berbagai pihak demi menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, reformasi birokrasi dan militer harus berjalan secara

pelan-pelan, pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, dan perlindungan kaum minoritas serta kebebasan pers masih harus diperjuangkan (Budiatri, 2022).

Di sisi lain, pemilu 2024 kemungkinan masih akan dibayangkan oleh politik identitas, yang pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 telah membuat masyarakat Indonesia mengalami polarisasi, yang menciptakan sebutan kelompok "cebong" dan kelompok "kampret".

Dengan keadaan di atas, para pemilih memiliki peran penting dalam menjadikan Pemilu 2024 sebagai jembatan memilih para pemimpin bangsa yang lebih baik, bersih dari korupsi, dan memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan demokrasi. Para pemilih perlu mendapatkan informasi yang benar untuk bisa memilih para pemimpin yang baik dan berjuang untuk negara, serta bisa membedakan kampanye buruk dan kampanye baik, sehingga mereka bisa tidak tersesatkan oleh informasi yang salah.

Kampus sebagai pusat Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (Tri Darma) memiliki kewajiban moral untuk turut mencerdaskan masyarakat, termasuk dalam masalah pemilihan umum. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui penyelenggaraan kegiatan ceramah dan diskusi tentang pemilu, yang saat ini dilaksanakan di Gya Dakwah Muhammadiyah, Sawangan Elok, Depok, Jawa Barat dengan mengambil tema "Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilu 2024. Diharapkan kegiatan ini bisa membantu mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan prinsip jujur dan adil, di mana masyarakat memilih menurut kehendak hati, dan para pemimpin yang terpilih bisa menjalankan jabatan secara amanah.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipilih adalah ceramah dan diskusi. Setelah itu, dilakukan polling untuk mengetahui bahwa apa yang telah disampaikan dalam pendidikan politik dan sosialisasi pemilu telah diterima dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilu dan Para Penyelenggara

Dalam kegiatan Ceramah dan Diskusi Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilu 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024 telah memiliki legitimasi dalam konstitusi dan merupakan pijakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan pasal:

- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"
- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999)
- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan (lihat KPU, 2022 a).

Pemilihan Umum merupakan kegiatan yang rentan menimbulkan kekisruhan sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Hal tersebut telah terjadi di banyak tempat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, telah ditetapkan Prinsip-Prinsip Pemilu

- Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: a. mandiri b. jujur c. adil d. berkepastian hukum e. tertib f. terbuka g. proporsional h. akuntabel

Kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum menuntut adanya para penyelenggara pemilu yang terpercaya. Oleh karena itu berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, terdapat tiga Lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum yakni (lihat KPU, 2022b):

- a) Komisi Pemilihan Umum
- b) Badan pengawas Pemilu
- c) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

B. Berita Bohong dan Ujaran Kebencian

Salah satu yang diperkirakan akan muncul dalam Pemilu 2024 adalah penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian. Pandangan ini merupakan Pelajaran dari apa yang telah terjadi pada pemilu tahun 2019, pilkada DKI 2017, dan pemilu tahun 2014. Berita bohong tersebut berkisar di seputar isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Isu yang disebarkan biasanya tuduhan bahwa seorang calon Presiden adalah keturunan China atau mendukung China, seorang calon presiden mendukung kebijakan proPKI dan anti-Islam. Sementara itu ujaran kebencian, didefinisikan sebagai “ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut kekerasan atau memunculkan prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain” (Bakri, et al, 2019: 200-202).

Ada beberapa ciri dari berita bohong dan ujaran kebencian, yakni:

- Pertama, Kecemasan, permusuhan, dan kebencian pada diri masyarakat.
- Kedua, ketidakjelasan sumber berita, beritanya sulit atau tidak terverifikasi.
- Ketiga, isi berita tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Keempat, berita sering disajikan bermuatan fanatisme terhadap ideologi tertentu.

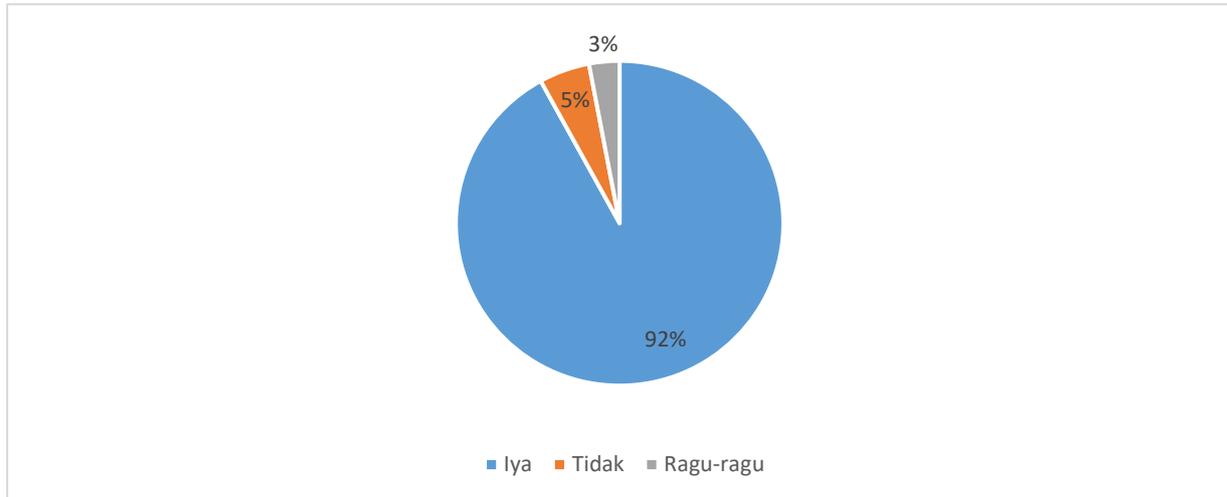
Tindakan yang perlu dilakukan ketika menerima berita adalah melakukan Tindakan penyaringan apakah berita tersebut benar atau salah. Jika memang sudah yakin tentang kebenarannya, maka barulah dilakukan penyebaran (sharing). Anggraeni et al (2020: 110-114) menyebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi berita bohong dan ujaran kebencian. Pertama, melalui pendekatan institusional, berupa pengawasan berita nasional melalui control etis penyaiaran, dan sosialisasi oleh berbagai pihak terkait aturan tentang ujaran kebencian seperti pada UU ITE, surat edaran POLRI dan KUHP. Kedua, melalui pendekatan agensi, berupa Pendidikan literasi kepada generasi orang tua dan orang muda, dan kampanye anti ujaran kebencian dan Gerakan sosial untuk melawannya. Menurut Rasidi et.al (2020: 135), pemerintah sebenarnya telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs dan akun media sosial yang menyebarkan berita bohong. Pemerintah juga telah bekerjasama dengan Dewan Pers dan Pengelola Facebook, selain membuat situs untuk mengklarifikasi berita bohong, yakni turnbackhoax.id.

C. Respon Peserta Diskusi dan Ceramah

Kegiatan ceramah dan diskusi yang dilakukan di Sungai Rukam, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil menarik perhatian dari peserta diskusi yang berjumlah sekitar 30 orang.

Berdasarkan polling yang kami lakukan setelah dilakukan ceramah diskusi, didapati hasil bahwa mayoritas peserta (92%) akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat dilaksanakan pemilihan umum. Hanya 5% peserta yang kemungkinan tidak akan datang ke TPS. Polling ini tidak menanyakan alasan mereka. Presentasi tersebut kemungkinan masih berubah karena hanya 13 responden yang menjawab pertanyaan.

Apakah akan datang ke TPS saat pemilu besuk ?



Terhadap sikap ketika menerima berita politik, sebanyak 69.2% menyatakan bahwa mereka akan sekedar membaca berita tersebut, 23.1 % akan menyebarkannya, dan sebanyak 7.7% tidak akan melakukan apa-apa. Presentasi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam kampanye guna mendukung calon presiden dan anggota DPR yang mereka sukai, dan masih rentan terhadap terpapar terhadap berita bohong.

Temuan yang menarik lainnya adalah bahwa banyak responden yang akan menolak politik uang. Yakni sebanyak 76.9 persen. Bahkan, sebanyak 15.4% menyatakan bahwa mereka akan melaporkan pelaku politik uang ke aparat.

Apa yang akan Anda lakukan jika Ada orang yang menawari uang untuk memilih calon tertentu?

13 responses



KESIMPULAN

Ceramah dan diskusi merupakan salah satu sarana pendidikan politik. Metode ini memungkinkan pembicaraan dua arah, sehingga peserta tidak hanya pasif mendengarkan apa yang disampaikan penceramah. Kesimpulan kegiatan menyatakan bahwa ceramah dan diskusi tentang pemilu 2024 telah terbukti mampu memberikan tambahan wawasan mengenai kegiatan pemilu 2024. Para peserta terlihat antusias untuk mengikuti diskusi. Berdasarkan polling, mayoritas peserta akan hadir ke TPS untuk memberikan suara, dan menolak politik uang. Hanya saja, mayoritas peserta masih memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam dukung-mendukung pasangan yang diinginkan dan dengan sikap tersebut, mereka rentan untuk terpapar pada berita bohong dan ujaran kebencian, yang berakibat pada polarisasi politik di dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UNISI, LPPM UNISI serta masyarakat desa Sungai Rukam atas pendanaan dan fasilitasnya. Kepada Fakultas, Program Studi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan fasilitasnya sehingga pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, G. M. A., & Faralita, E. (2023). Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia. *WASAKA HUKUM*, 11(1), 62-77.
- [2] Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- [3] Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2).
- [4] Bakri, S., Zulhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). Menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian bermuatan isu suku, agama, ras, dan antargolongan di tahun politik. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 199-234.

- [5] Budiatri, A. P., & WIRATRAMAN, H.
- [6] (Eds.). (2022). *Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.
- [7] Komisi Pemilihan Umum (KPU a), 2022. *Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024, Tahun 2022*
- [8] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU b) 2022 *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 4 Tahun 2022*
- [9] Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Indonesia: Jokowi sidelines democracy. *Journal of Democracy*, 32(4), 72-86.
- [10] Rasidin, M., Witro, D., Yanti, B. Z., Purwaningsih, R. F., & Nurasih, W. (2020). The role of government in preventing the spread of hoax related the 2019 elections in social media. *Diakom*, 3(2), 127-137.